

ABSTRAK

PERAN BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENGAWASAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU 2024 (Studi Kasus TPS 19 Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang)

Oleh

DEWI MURTASIAH

Pengawasan distribusi logistik pemilu merupakan faktor penting dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Pada Pemilu 2024 di TPS 19 Kelurahan Way Kandis, Kota Bandar Lampung, ditemukan surat suara yang telah tercoblos meskipun masih dalam kondisi tersegel. Peristiwa ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan logistik, khususnya pada tahap akhir distribusi di tingkat TPS. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pengawasan distribusi logistik tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori pengawasan Mulyadi yang meliputi pengawasan *eksternal*, *preventif*, dan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pelanggaran meliputi keterbatasan jumlah pengawas TPS, lemahnya sistem pengamanan dan pengelolaan logistik yang belum sepenuhnya sesuai SOP, serta kurangnya pemahaman teknis penyelenggara di tingkat KPPS. Secara normatif, Bawaslu telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai ketentuan melalui sistem berjenjang dan koordinasi lintas pihak. Namun, secara empiris pengawasan belum berjalan optimal, ditandai dengan masih terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, pengawasan distribusi logistik di TPS 19 Way Kandis belum sepenuhnya efektif dan memerlukan penguatan di tingkat TPS, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan sistem pengamanan logistik guna menjamin integritas pemilu di masa mendatang.

Kata Kunci: Pengawasan Pemilu, Distribusi Logistik, Peran Bawaslu

ABSTRACT

THE ROLE OF THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY (BAWASLU) OF BANDAR LAMPUNG CITY IN SUPERVISING THE DISTRIBUTION OF ELECTORAL LOGISTICS IN THE 2024 GENERAL ELECTION (Case Study of Polling Station 19, Way Kandis Subdistrict, Tanjung Senang District)

By

DEWI MURTASIAH

The supervision of electoral logistics distribution is a crucial factor in ensuring the implementation of fair and honest elections. In the 2024 General Election at Polling Station (TPS) 19, Way Kandis Subdistrict, Bandar Lampung City, ballot papers were found to have been pre-marked despite still being sealed. This incident indicates weaknesses in logistics supervision, particularly at the final stage of distribution at the polling station level. This study aims to analyze the role of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Bandar Lampung City in supervising the distribution of electoral logistics. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The analysis is based on Mulyadi's supervision theory, which includes external supervision, preventive supervision, and direct supervision. The results show that the causes of the violation include the limited number of polling station supervisors, weak security systems and logistics management that did not fully comply with standard operating procedures (SOP), and a lack of technical understanding among election organizers at the KPPS level. Normatively, Bawaslu has carried out its supervisory functions in accordance with applicable regulations through a tiered supervision system and coordination with relevant stakeholders. However, empirically, the supervision has not been optimal, as indicated by the occurrence of violations. Therefore, the supervision of logistics distribution at TPS 19 Way Kandis has not been fully effective and requires strengthening at the polling station level, improving human resource capacity, and enhancing logistics security systems to ensure the integrity of future elections.

Keywords: Election Supervision, Logistics Distribution, Role of Bawaslu